



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2024**

**TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

5. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup dinas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
- b. pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (3) Memperhatikan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah menjaga kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.

Pasal 6

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - c. BAB III Tujuan dan Sasaran;
 - d. BAB IV Rencana kerja dan Pendanaan; dan
 - e. BAB V Penutup.

- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah secara berkala setiap triwulan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang.
- (4) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis usulan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
 - c. Perubahan RKPD Tahun 2024; dan
 - d. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 5 Agustus 2024
BUPATI PESISIR SELATAN,



KUSMA YUL ANWAR

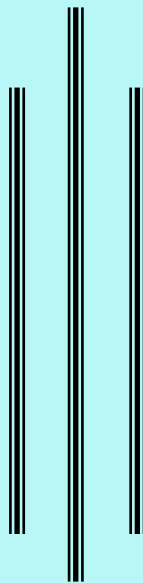
Diundangkan di Painan
Pada tanggal 5 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA



RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025



**KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, atas limpahan rahmat, hidayah dan ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dengan baik.

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara substansi, Dokumen Renja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 memuat hasil evaluasi Renja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun lalu (n-2), tujuan dan sasaran Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, serta rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna seperti yang diharapkan, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran yang akan menjadi masukan dalam identifikasi permasalahan pembangunan, arah kebijakan pembangunan, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, penyelarasan dengan sasaran dan prioritas nasional, dan identifikasi program dan kegiatan di masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini, kami ucapkan terimakasih, Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'aala memberkahi kerja kita, aamiin.

Silaut, 5 Agustus 2024
Kecamatan SILAUT,

FLIZEN, S.Sos.
Penata TK I / III.d
NIP. 197206051993031005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	36
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	36
3.3 Program dan Kegiatan	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	50
BAB V PENUTUP	60



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Pesisir selatan	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan	22
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Pesisir Selatan	27
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan	34
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	40
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	44
Tabel 4.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan	53



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah yang wajib disusun oleh seluruh Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja ini memuat kerangka pendanaan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kecamatan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

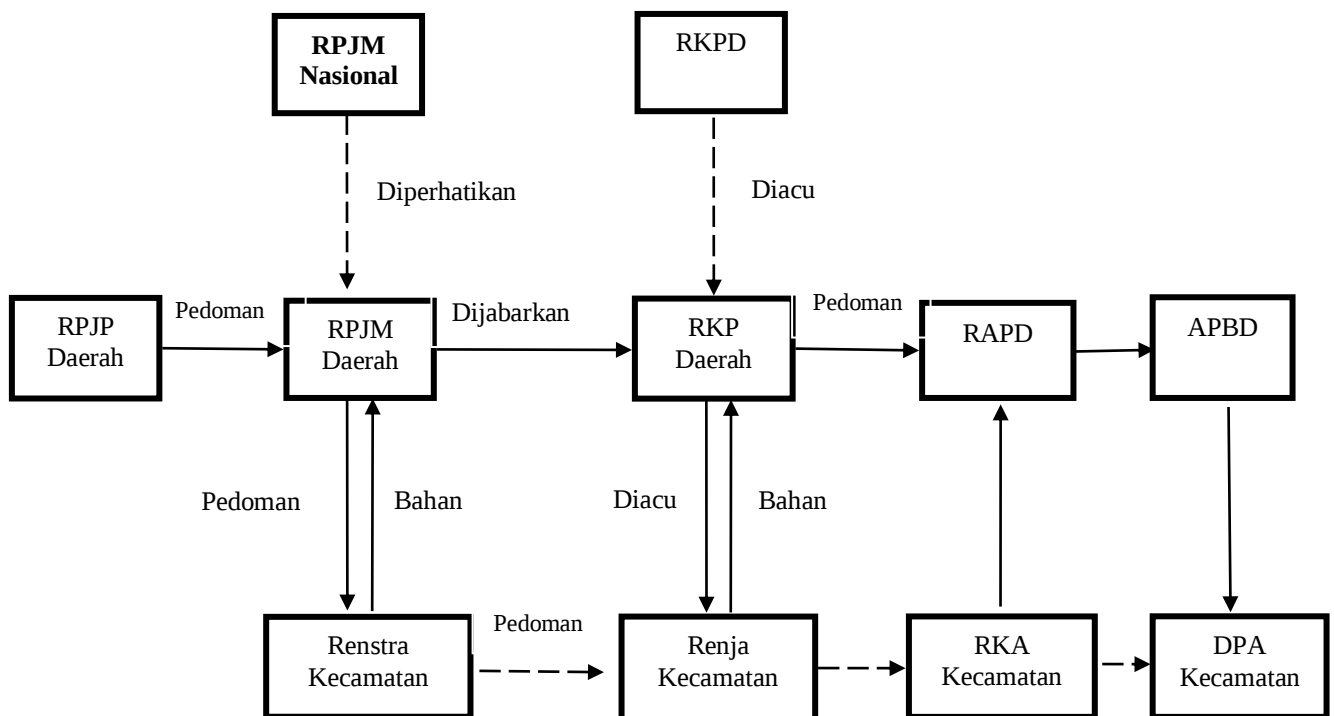
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan

pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Pesisir selatan dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025. Hasil perumusan Rencana Kerja disajikan dengan sistematika yang meliputi: pendahuluan, hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu, tujuan dan sasaran, rencana kerja pendanaan dan penutup.

Renja Kecamatan Silaut Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Silaut Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1: Tahapan Penyusunan Renja Kecamatan Silaut Tahun 2025



Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Kecamatan Silaut mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansi menterjemahkan visi, misi dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2009 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021– 2026;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 127 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Silaut Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;



1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Kecamatan Silaut dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah:

1. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai bentuk komitmen Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pada bab ini menjelaskan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Renstra Kecamatan Silaut, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Daerah serta Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 senilai Rp 1.662.590.094,- (Satu milyar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh empat rupiah) terdiri dari 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan, realisasi anggaran senilai Rp. 1.616.804.468,- (Satu milyar enam ratus enam belas juta delapan ratus empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah). Untuk menilai kinerja capaian keuangan dan hasil kegiatan, status capaian kinerja dikelompokkan menjadi "Sangat Tinggi" yaitu capaian berkisar antara >90-100%, "Tinggi" yaitu capaian berkisar antara >75-90%, "Sedang" yaitu capaian berkisar antara >65-75%, "Rendah" yaitu capaian berkisar antara 50-65%, dan "Sangat Rendah" yaitu capaian di bawah 50%.

Berdasarkan capaian kinerja keuangan pelaksanaan Renja tahun 2023 terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang dengan status capaian "Sangat Tinggi" (97,25%). Untuk capaian kinerja keluaran (*output*) kegiatan semuanya sudah tercapai sesuai perencanaan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dari berbagai indikator pada setiap sasaran yang akan dicapai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Tabel Rekapulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKT Kecamatan Silaut dan Pencapaian Renstra Kecamatan Silaut sampai dengan Tahun berjalan, dengan Tabel 2.1 dibawah ini :



Tabel 2.1
Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024
Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan
Silaut

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ kegiatan (<i>output</i>)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n- 2) 2023	Realisasi Renja perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01			<u>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</u>	<u>Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten (%)</u>	100	100	100	100	100%	100	300	3
7	01	01	2.01		<u>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	<u>Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)</u>	100	100	100	100	100%	100	300	3



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	4	7	7	7	100%	2	16	4
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	8	20	20	20	100%	20	60	8
7	01	01	2.02		<u>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>	<u>Persentase Tertib Administrasi Keuangan (%)</u>	100	100	100	100	100%	100	300	3
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	168	144	144	144	100%	168	456	3
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	12	12	12	100%	12	36	3
7	01	01	2.06		<u>Administrasi Umum Perangkat Daerah</u>	<u>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</u>	100	100	100	100	100%	100	300	3
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1	5	1	1	100%	1	7	7



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	0	3	0	0		0	3	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	3	3	3	3	100%	3	9	3
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	2	2	2	2	100%	2	6	3
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dokumen)	0	12	12	12	100%	12	36	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	1	4	4	4	100%	4	12	12
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	4	12	12	12	100%	12	36	9
7	01	01	2.07		<u>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</u>	<u>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)</u>	100	0	100	100	100%	100	200	2



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	0	-	0	0	0%	0	0	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	4	-	0	0	0%	3	3	1
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	0	-	5	5	0%	6	11	
7	01	01	2.08		<u>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	<u>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</u>	100	100	100	100	100%	100	300	3
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	4	12	12	12	100%	12	36	9
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	4	12	12	12	100%	12	36	9



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

7	01	01	2.09		<u>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	<u>Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik (%)</u>	100	100	100	100	100%	100	300	3
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	4	4	4	4	100%	4	12	3
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	8	12	12	12	100%	12	36	5
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	2	2	2	2	100%	2	6	3
<u>7</u>	<u>01</u>	<u>02</u>	-	-	<u>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</u>	<u>Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan (%)</u>	<u>85</u>	<u>80</u>	-	-	-	<u>85</u>	165	
7	01	02	2.04		<u>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</u>	<u>Persentase fasilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (%)</u>	85	70				85	155	



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (laporan)		4					4	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)	12	12				12	24	
7	01	03			<u>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</u>	<u>Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan (%)</u>		40					40	
7	01	03	2.01		<u>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</u>	<u>Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan (%)</u>	40	40				40	80	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga)	10	10				10	20	



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	4	4				4	8	
7	01	04			<u>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum</u>	<u>Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)</u>	80	90				80	170	
7	01	04	2.01		<u>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</u>	<u>Persentase fasilitasi dan kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)</u>	80	90				80	170	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)	1	4				1	5	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (laporan)		4					4	



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

7	01	05			<u>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</u>	<u>Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum (%)</u>	80	80				80	160	
7	01	05	2.01		<u>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</u>	<u>Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (%)</u>	80	80				80	160	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (orang)	12	12				12	24	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (dokumen)	1	2				1	3	
7	01	06			<u>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</u>	<u>Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik (nagari)</u>	75	10				75	85	
7	01	06	2.01		<u>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</u>	<u>Jumlah pemerintahan nagari yang dibina dan diawasi (nagari)</u>	75	10				75	85	



7	01	05	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (dokumen)	1	4				1	5	
7	01	05	2.01	18	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (dokumen)	1	4				1	5	

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2023 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Kecamatan Silaut Tahun 2021-2026.

Adapun Evaluasi terhadap capaian Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 senilai 2.160.238.388,- (Dua milyar seratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan realisasi anggaran sampai dengan kondisi Triwulan II sebesar Rp **933.488.401,-** (Sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus satu rupiah).

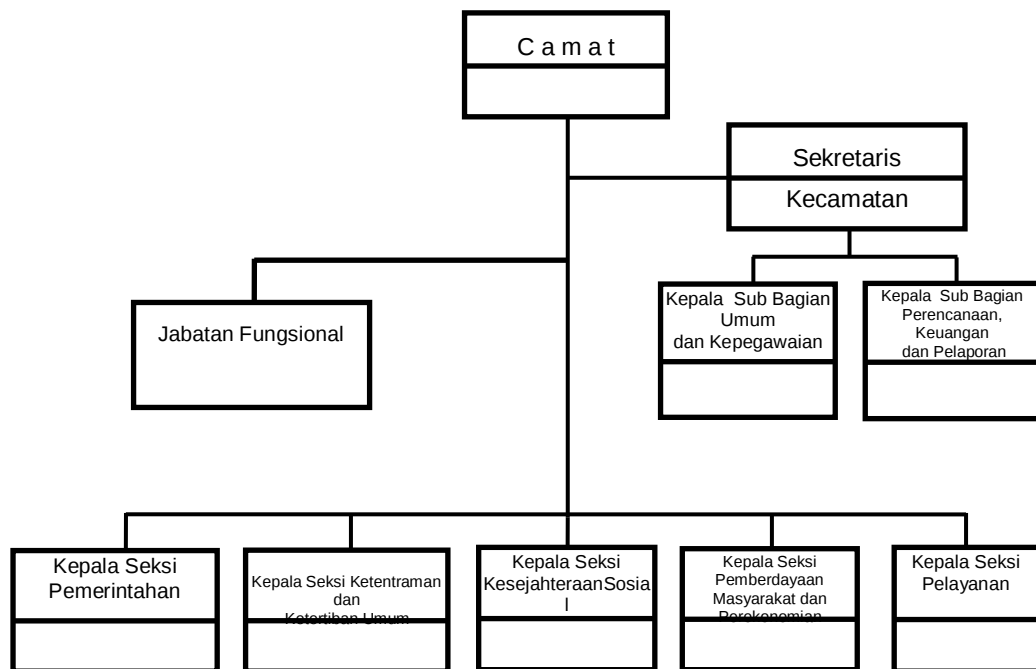
Berdasarkan capaian kinerja keuangan pelaksanaan Renja tahun 2024 terdapat 6 program kegiatan dengan capaian 43,21% hal ini disebabkan karena realisasi masih dalam kondisi Triwulan II dan masih banyaknya kegiatan yang pelaksanaannya akan dilakukan pada Triwulan III dan IV. Sehingga secara garis besar capaian kinerja keluaran (output) kegiatan pada kondisi Triwulan II sudah tercapai sesuai perencanaan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, diamanatkan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya, berdasarkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani unsur kewilayahan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Nagari;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan.



Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- a. Camat;
- b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, terdiri dari:
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian;
- g. Seksi Pelayanan;
- h. Jabatan Fungsional.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

A. Kinerja pelayanan di bidang Pemerintahan

1. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat Nagari dan kampung

2. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di seluruh Nagari bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait.
3. Memberikan arahan kepada pemerintahan Nagari untuk membuat peraturan Nagari sebagai payung hukum di tingkat Nagari.
4. Memberikan pembinaan kepada penambangan galian C.
5. Melakukan pembinaan dalam peningkatan PBB.
6. Kerjasama wilayah perbatasan
7. Penataan pelayanan public dan terpadu di Kecamatan (satu) pintu.
8. Pelaksanaan apel gabungan di kecamatan
9. Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti diklat,kursus dalam peningkatan sumber daya aparatur Kecamatan dan Nagari
10. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan dinas instansi terkait di tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.
11. Pembinaan kelengkapan administrasi Nagari dan pendampingan dalam membuat APB-Nagari.

B. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan dengan memfasilitasi, membina, dan memantau kegiatan peningkatan infrastruktur yang berbasis masyarakat (Kemitraan, swadaya murni, UPK, dan lain-lain)
2. Memfasilitasi,membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan, dan peternakan.
3. Pemberdayaan masyarakat pinggir kawasan hutan
4. Fasilitasi pembentukan kelompok HKm (Hutan Kemasyarakatan)
5. Fasilitasi peningkatan produk unggulan Nagari
6. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan.
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta kesehatan.
8. Pembinaan kelompok simpan pinjam dan Program UPK.

C. Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin)
2. Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah
3. Pelaksanaan Peringatan hari-hari besar Keagamaan
4. Pelaksanaan Peringatan hari Bakti Transmigrasi
5. Monitoring penyaluran Jamkesmas dan Jamkesda
6. Membantu penanganan masalah sosial dan bencana alam
7. Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait dengan kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan. Kinerja Pelayanan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan
4. Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik
5. Angka Kemiskinan Ekstrim
6. Prevalensi Stunting (Eppgbm)
7. Persentase Konflik yang Diselesaikan

Berikut dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Silaut
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	A (80,43)	A (81,0)	A (81,0)	A (81,0)	A (80,54)	A (80,54)	A (81,0)	A (81,0)	Realisasi 2023 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	85	85	87	87	85	85.25	87	87	Realisasi 2023 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
3.	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan			85	85	89	89	85	87	89	89	Realisasi 2023 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
4.	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	-	-	75%	75%	75%	75%	75%	70%	75%	75%	Realisasi 2023 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
5.	Angka Kemiskinan Ekstrim	-	-	-	0%	0%	0%	-	0%	-	-	Realisasi 2024 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
6.	Prevalensi Stunting (Eppgbm)	-	-	0	5,20%	5%	5%	-	5.15%	5%	5%	Realisasi 2023 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target
7.	Persentase Konflik yang Diselesaikan	-	-	80%	80%	82%	82%	80%	80%	82%	82%	Realisasi 2023 dan proyeksi 2025-2026 memakai angka target

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

1) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah :

a. Kecamatan

Permasalahan Kecamatan Silaut dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya atau belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, yang disebabkan:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai;
2. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
4. Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi Perkantoran;
5. Perencanaan program dan kegiatan yang belum tepat sasaran sehingga belum terwujudnya pemerintahan yang good governance

Adapun Permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Silaut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Seksi Pemerintahan

- a. Urusan Pencapaian Target PBB-P2 memiliki permasalahan:
 1. Masih banyaknya masyarakat yang tidak membayar PBB-P2.
 2. Keberadaan wajib pajak tidak diketahui keberadaannya. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dalam meningkatkan pelayanan wajib pajak.
- b. Peraturan Nagari, masalahnya:

Masih rendahnya kepedulian Nagari dalam merumuskan dan membuat peraturan Nagari sebagai payung hukum bagi nagari dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.

Upaya yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi kepada pemerintahan Nagari tentang pedoman pembuatan peraturan Nagari.

- c. Masih perlu ditingkatkannya kesadaran Masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- d. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap antisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
- e. Kurangnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha;

Upaya yang telah dilakukan adalah :

- 1. Mengadakan Sosialisasi secara berkala berkaitan dengan Ketentraman Ketertiban dan Keamanan Wilayah;
- 2. Meningkatkan kesadaran hukum tentang hak dan Kewajiban yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha;

2. Seksi Ekonomi Pembangunan

Bidang ekonomi pembangunan di Kecamatan Silaut pada umumnya berjalan baik, tetapi di bidang perkoperasian perlu peningkatan pemahaman tentang administrasi.

Upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi bidang pembangunan sehingga memaksimalkan kegiatan pembangunan tersebut.

3. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan
- b. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Keluarga masih dirasakurang
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi ikut serta mensukseskan pembangunan yang ada di wilayah mereka.

Upaya yang dilakukan adalah

- a. Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah.
- b. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Wali Nagari untuk memaksimalkan peran kader dan institusi Masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaiantarget Keluarga Berencana.

2) Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional

Dalam satu kerangka pembangunan nasional yang terintegrasi, Rancangan awal RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan telah dipaduselaraskan dan diharmonisasikan dengan visi dan misi Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2021-2024 serta visi dan misi gubernur Sumatera Barat dalam rancangan RPJMD Sumbar Tahun 2021-2026.

Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2021-2026 berdampak terhadap capaian program nasional yaitu memajukan kehidupan masyarakat dari semua sektor, seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pariwisata. Pembangunan menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan penggalian sumber daya dalam proses mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam kehidupan masyarakat madani.

3) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Silaut

Tantangan

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas Pemerintahan.
2. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Dinas Teknis terkait.
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah.

Peluang

1. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah serta pelayanan publik.
2. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan tupoksi Kecamatan.
3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Silaut Tahun 2025 terhadap kebutuhan yang dapat dilihat pada Tabel 2.3. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.



Tabel 2.3
Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Silaut

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Silaut	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten (%)	100	1.716.200.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Silaut	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten (%)	100	1.716.200.000	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Silaut	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)	100	8.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Silaut	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)	100	8.000.000	
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kecamatan Silaut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	4	4.000.000	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kecamatan Silaut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	4	4.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	8	4.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	8	4.000.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Silaut	Persentase Tertib Administrasi Keuangan (%)	100	1.434.200.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Silaut	Persentase Tertib Administrasi Keuangan (%)	100	1.434.200.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Silaut	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	168	1.388.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Silaut	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	168	1.388.000.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Silaut	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	46.200.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Silaut	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	46.200.000	



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Silaut	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	123.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Silaut	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	123.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Silaut	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Silaut	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1	3.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Silaut	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Silaut	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	0	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Silaut	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	3	12.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Silaut	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	3	12.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Silaut	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	2	4.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Silaut	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	2	4.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Silaut	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dokumen)			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Silaut	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dokumen)			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	1	6.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	1	6.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	4	98.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	4	98.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Silaut	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	20.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Silaut	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	20.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Silaut	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)		0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Silaut	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)		0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Silaut	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	4	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Silaut	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	4	20.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Silaut	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Silaut	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)			



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Silaut	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	50.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Silaut	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	4	4.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	4	4.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	4	46.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	4	46.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Silaut	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik (%)	100	81.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Silaut	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik (%)	100	81.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Silaut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	4	57.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Silaut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	4	57.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Silaut	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	8	4.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Silaut	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	8	4.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Silaut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	2	20.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Silaut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	2	20.000.000	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Silaut	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan	82	0	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Silaut	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan	82	0	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Silaut	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (%)	70	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Silaut	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (%)	70	0	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (laporan)			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (laporan)			



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)			
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Silaut	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan (%)	40	17.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Silaut	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan (%)	40	17.000.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Silaut	Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan (%)	40	17.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Silaut	Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan (%)	40	17.000.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Silaut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga kemasyarakatan)	10	7.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Silaut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga kemasyarakatan)	10	7.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	4	10.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	4	10.000.000	
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Kecamatan Silaut	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	80	0	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Kecamatan Silaut	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	80	0	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Silaut	Persentase fasilitasi dan kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	80	0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Silaut	Persentase fasilitasi dan kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	80	0	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)			
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (laporan)			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Silaut	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (laporan)			



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Silaut	Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum (%)	80	6.000.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Silaut	Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum (%)	80	6.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Silaut	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (%)	80	6.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Silaut	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (%)	80	6.000.000	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Silaut	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (orang)			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Silaut	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (orang)			
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Silaut	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (dokumen)	1	6.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Silaut	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (dokumen)	1	6.000.000	
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kecamatan Silaut	Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik (Nagari)	10	2.000.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kecamatan Silaut	Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik (Nagari)	10	2.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Silaut	Jumlah pemerintahan nagari yang dibina dan diawasi (nagari)	10	2.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Silaut	Jumlah pemerintahan nagari yang dibina dan diawasi (nagari)	10	2.000.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Silaut	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (dokumen)			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Silaut	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (dokumen)			
	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kecamatan Silaut	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (dokumen)	4	2.000.000	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kecamatan Silaut	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (dokumen)	4	2.000.000	
	Jumlah				1.741.200.000	Jumlah				1.741.200.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *Bottom Up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Nagari, Kecamatan dan tingkat Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Bupati dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem E-Planning yang diajukan ke Kecamatan Silaut. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Kecamatan Silaut berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2025 dari Para Pemangku Kepentingan pada saat musrenbang tingkat Kecamatan Silaut Tahun 2024 adalah sebagai tabel 2.4. berikut:



Tabel 2.4
HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI USULAN KEGIATAN PRIORITAS
UNTUK DIDANAI TAHUN 2025
Kecamatan : Silaut

NO.	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	PAGU	PD PENANGGUNG JAWAB	CATATAN FERIVIKASI	REKOMENDASI (LAYAK/ TIDAK LAYAK)	NILAI (50-100)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Fisik	Rehap Jalan Utama Trans Silaut	Masyarakat Umum	10 Nagari	30 Km	3.000.000.000	Dinas PUTR		Layak	
		Rehap Jembatan di Jalan Poros Utama Trans Silaut	Masyarakat Umum	Jembatan Beli Simpang Talang Binjai, Jembatan beli Pasir Binjai dan sambungo	3 Buah Jembatan (Jembatan Beli Simpang Talang Binjai, Jembatan beli Pasir Binjai dan sambungo)	1.000.000.000	Dinas PUTR		Layak	
		Aspal Jalan SMKN1 Kec. Silaut	Memperlancar transportasi guru, murid dan masyarakat pemukiman	Silaut	300 m	180.000.000	Dinas PUTR		Layak	
		Aspal Jalan dan Gerbang Kantor Camat	Peningkatan transportasi Perkantoran	Silaut	200 m	700.000.000	Dinas PUTR		Layak	
		Pembangunan Jembatan Penghubung Antar Nagari Sambungo dan Air Hitam	Masyarakat	Sambungo Dan Air Hitam	1 Paket	1.000.000.000	Dinas PUTR		Layak	



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

		pengaspalan jalan ke KUA,DUKCAPI L Dan TK/PAUD	Masyarakat	Sungai Sirah	150 meter	450.000.000	Dinas PUTR		Layak	
		Pengaspalan HOTMIT Jl Penghubung Kabupaten	Masyarakat	Talang Binjai	2,5 Km	6.000.000.000	Dinas PUTR		Layak	
		Lanjutan Aspal Jalan Simpang Polsek-Sungai Pulai	Memperlancar transportasi masyarakat dan kesejahteraan	Silaut - Sungai Pulai	3 Km	1.000.000.000	Dinas PUTR		Layak	
		Normalisasi sungai kewenangan kabupaten	Kesadaran Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	Air Hitam	9 Unit	150.000.000	Dinas PUTR		Layak	
		Penambahan Tiang Listrk dan Lampu Jalan	keamanan dan Perangan sepanjang jalan pemukiman masyarakat	Lubuk Bunta	1 paket	150.000.000	Dinas PUTR		Layak	
		Pagar Puskesmas Tanjung Makmur	Pelayanan Puskesmas Tanjung Makmur		800 M	800.000.000	Dinas Kesehatan		Layak	
		Rumah Dinas Dokter Puskesmas Tanjung Makmur	Pelayanan Puskesmas Tanjung Makmur		1 Unit	300.000.000	Dinas Kesehatan		Layak	
		Pengadaan SARPRAS wisata pantai Sambungo	Masyarakat	Sambungo	2 paket	150.000.000	Dinas Pariwisata		Layak	



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

		Pembangunan Sarana & Prasarana Pasar dan UMKM	Meningkatkan SDM dalam menggunakan kapasitas teknologi tepat guna	Pasir Binjai	1 Paket	800.000.000	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja		Layak	
		Pembuatan/pengadaan rambu dan marka jalan di simpang 3 pasar silaut	Masyarakat	Sungai Sirah	1 paket	200.000.000	Dinas Perhubungan		Layak	
2	Sumber Daya Manusia	Perbaikan Data DTKS	Pemerintah Nagari Se-Kecamatan Silaut	10 Nagari	10 Nagari	500.000.000	Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		Layak	
		Pembinaan dan Pelatihan Usaha Ekonomi Kreatif dan Usaha Rumahan	Kelompok UMKM	10 Nagari	10 Kelompok di 10 Nagari	100.000.000	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja		Layak	
		Peningkatan Pelatihan Keterampilan Bagi Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrim	Kesejahteraan Keluarga Miskin se-Kecamatan Silaut	10 Nagari	Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrim di 10 Nagari	500.000.000	Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		Layak	
		Penambahan Kuota BPJS KIS dan APBD	Kesejahteraan Keluarga Miskin se-Kecamatan Silaut	10 Nagari	10 Nagari	500.000.000	Dinas kesehatan		Layak	
		Pelatihan Orang tua /Parenting (Pola Asuh) yang memiliki anak terindikasi Stunting	Peningkatan Kualitas SDM bagi Masyarakat	10 Nagari	10 Paket	300.000.000	Dinas Kesehatan		Layak	



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

3	Ekonomi	Rumah Pengolahan Susu Kambing	Menumbuhkan perekonomian masyarakat	Durian seribu	1 Paket di Nagari Durian Seribu	1.000.000.000	Dinas peternakan		Layak	
		Penataan dan Perubahan Status kawasan Hutan HPT menjadi Hutan Sosial Nagari	Penyelesaian konflik kehutan dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat yang berladang.	silaut	1 paket	150.000.000	Bapedalitbang		Layak	
		Bantuan Pengadaan Bibit, Pupuk, Obat Pertanian Palawija dan Perkebunan Kelapa Sawit/raplating	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	Silaut	1 paket	800.000.000	Dinas Pertanian		Layak	
		Pembangunan Jalan dan Pembinaan Petani Hutan	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	Silaut	1 paket	700.000.000	Bapedalitbang		Layak	
		Pengadaan SARPRAS pengelolaan hasil hutan Nagari	Masyarakat	Sambungo	1 Paket	50.000.000	Bapedalitbang		Layak	
		Bantuan pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat miskin	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi bagi Masyarakat	Air Hitam	10 Paket	25.000.000	Bagian Perekonomian SDA Sekretariat daerah		Layak	
		Subsidi listrik bagi keluarga miskin	Masyarakat	Pasir Binjai Dan Sambungo	2 Paket Nagari Pasir Binjai dan Sambungo	159.000.000	Bagian Perekonomian SDA Sekretariat daerah		Layak	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sehubungan dengan pelaksanaan Nawacita dimana pelaksanaan pembangunan dari pinggir Kecamatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa/Nagari sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam mewujudkan pembangunan Desa/Nagari, tujuan/indikator yang bisa ditetapkan Kecamatan Silaut adalah:

1. Mengoptimalkan fungsi fasilitasi Pembinaan produk unggul nagari dan pemberdayaan masyarakat
2. Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (pembangunan kawasan pedesaan berbasis ternak sapi bali).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 mengacu pada visi dan misi Rencana Startegis (Renstra) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan serta selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026. Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 adalah:

“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Misi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan yang sesuai dengan urusan Kewilayahan/Kecamatan adalah misi kesatu yakni **“Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.”**

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 maka tujuan yang hendak dicapai yaitu:

“Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi. “

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator outcome yang terukur. Dalam perumusan Sasaran, harus benar-benar diperhatikan

keterukuran dari indikator kinerja Sasaran yang akan diukur. Sasaran yang hendak dicapai dalam peningkatan pelayanan publik tahun 2025 yaitu:

- a. Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja.
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
- c. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah.
- d. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari
- e. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Tahun 2025
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi.	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,0)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	89
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	75%
			Angka Kemiskinan Ekstrem	0%
			Prevalensi Stunting (Eppgbm)	5%
2.	Terciptanya kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenteram dan Dinamisin.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	82%

3.3. Program Dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dalam Renja 2025 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Bupati Pesisir Selatan.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan tahun 2025:

Jumlah Program	: 6 (Enam)
Jumlah Kegiatan	: 11 (Sebelas)
Jumlah Sub Kegiatan	: 25 (Dua puluh lima)
Pagu Indikatif APBD	: Rp 1.741.200.000,- (<i>Satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah</i>).

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah.
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

5. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik:

Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

Sub Kegiatan:

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

III. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa:

Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Sub Kegiatan:

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.



2. Fasilitas Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

IV. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Sub Kegiatan:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

V. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Sub Kegiatan:

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

VI. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
2. Fasilitas Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.



Uraian rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN							1.741.200.000			0			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							1.716.200.000			0			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							8.000.000			0			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	4 Dokumen	100 %	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	20 Laporan	100 %	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.434.200.000					0
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tertibnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	168 Orang/bulan	12 bulan	1.388.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tertibnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	12 bulan	46.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								123.000.000					0
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tertibnya administrasi umum Perangkat daerah yang baik	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	2 Paket	12 bulan	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tertibnya administrasi umum Perangkat daerah yang baik	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	0 Paket	12 bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tertibnya administrasi umum Perangkat daerah yang baik	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	3 Paket	12 bulan	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tertibnya administrasi umum Perangkat daerah yang baik	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	2 Paket	12 bulan	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab.	100 %	0



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tertibnya administrasi umum Perangkat daerah yang baik	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	1 Dokumen	12 bulan	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tertibnya administrasi umum Perangkat daerah yang baik	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	1 Laporan	12 bulan	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertibnya administrasi umum Perangkat daerah yang baik	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	12 bulan	98.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							20.000.000				0		
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	1 Unit Sepeda Motor	1 unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	2 Unit Printer, 2 Unit Laptop	4 unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab.	100 %	0
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	1 Unit tempat tidur, 1 Set Kursi Tamu, 1 Unit AC	3 unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								50.000.000					0
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	4 Laporan	12 bulan	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	4 Laporan	12 bulan	46.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								81.000.000					0
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	4 Unit	12 bulan	57.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	12 Unit	12 bulan	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	100 %	2 Unit	12 bulan	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	0



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					0					0
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					0					0
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah MTQ yang diikuti Jumlah remaja mesjid yang aktif Persentase Mesjid yang melaksanakan subuh berjamaah Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Terselenggaranya urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat di kecamatan silaut	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Semua Kelurahan						
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah MTQ yang diikuti Jumlah remaja mesjid yang aktif Persentase Mesjid yang melaksanakan subuh berjamaah Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terselenggaranya urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat di kecamatan silaut	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	85 Tanpa Satuan	1 Laporan	12 Bulan			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					17.000.000					0
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					17.000.000					0
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di nagari	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut		10 Lembaga	2 Bulan			
										7.000.000					



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di nagari	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut		1 Laporan	12 Bulan	10.000.000					
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								0					0
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								0					0
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut		1 Laporan	12 Bulan	0					
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut				0					



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								6.000.000					0
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								6.000.000					0
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut		12 Orang	12 Bulan	0					
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut		1 Dokumen	12 Bulan	6.000.000					
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								2.000.000					0
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								2.000.000					0
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik Jumlah Penetapan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Adminstrasi Pemerintahan Nagari	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut		1 Dokumen		0					



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

7	01	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik Jumlah Penetapan Kawasan Perdesaan yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Adminstrasi Pemerintahan Nagari	Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut				2.000.000					
					TOTAL								1.741.200.000					0

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Silaut. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Kecamatan Silaut kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kecamatan Silaut. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Silaut.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:



Tabel 4.1
Tabel TC-27

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Data Pencapaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
										Target	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	10	11	20	21
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten (%)		100	1.716.200.000	Kec. Silaut	
			7	01	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)		100	8.000.000	Kec. Silaut	
							Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)		4	4.000.000	Kec. Silaut	
							Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)		8	4.000.000	Kec. Silaut	



			7	01	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan (%)		100	1.434.200.000	Kec. Silaut	
							Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)		168	1.388.000.000	Kec. Silaut	
							Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)		12	46.200.000	Kec. Silaut	
			7	01	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		100	123.000.000	Kec. Silaut	
							Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)		1	3.000.000	Kec. Silaut	
							Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)					
							Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)		3	12.000.000	Kec. Silaut	
							Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)		2	4.000.000	Kec. Silaut	



						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)					
						Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan)		1	6.000.000	Kec. Silaut	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)		4	98.000.000	Kec. Silaut	
				7	01	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	20.000.000	Kec. Silaut
						Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)					
						Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)		4	20.000.000	Kec. Silaut	
						Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Disediakan (unit)					



7	01	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		100	50.000.000	Kec. Silaut	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)		4	4.000.000	Kec. Silaut	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)		4	46.000.000	Kec. Silaut	
7	01	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik (%)		100	81.000.000	Kec. Silaut	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)		4	57.000.000	Kec. Silaut	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)		8	4.000.000	Kec. Silaut	



						Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)		2	20.000.000	Kec. Silaut	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan		85%	0	Kec. Silaut	
		7	01	02	2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (%)		70	0	Kec. Silaut	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (laporan)					
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (laporan)					



	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik (Nagari)		10	2.000.000	Kec. Silaut	
		Prevalensi Stunting (Eppgbm)	7	01	06	2.01	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan nagari yang dibina dan diawasi (nagari)		10	2.000.000	Kec. Silaut	
		Angka Kemiskinan Ekstrem					Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (dokumen)					
	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan					Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitas Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (dokumen)		1	2.000.000	Kec. Silaut	
			7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan (%)		40	17.000.000	Kec. Silaut	
			7	01	03	2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan (%)		40	17.000.000	Kec. Silaut	



						Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (lembaga kemasyarakatan)		10	7.000.000	Kec. Silaut	
						Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)		1	10.000.000	Kec. Silaut	
Terciptanya kondisi masyarakat Pesisir Selatan yang aman, tenteram dan dinamis	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	7	01	05		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	80%	0	Kec. Silaut	
			7	01	05	2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase fasilitasi dan kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	80%	0	Kec. Silaut	



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

					Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (laporan)					
					Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (laporan)					
			7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum (%)	80	6.000.000	Kec. Silaut	
			7	01	05	2.01 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (%)	80	6.000.000	Kec. Silaut	
						Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (orang)				



Rencana Kerja (Renja)
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

							Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (dokumen)		1	6.000.000	Kec. Silaut	
JUMLAH											1.741.200.000		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis tahun 2021–2026. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2025.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD adalah sebagai berikut:

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.
4. Mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Untuk mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ini, akan diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Pesisir Selatan.

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR